

Reduksi Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Siti Rohima ¹,  Liliana ¹,  dan Aning Kesuma Putri ^{2,*} 

¹ Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi,

Universitas Sriwijaya, 30662, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia

² Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi,

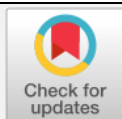
Universitas Bangka Belitung, 33172, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

* Korespondensi: aning@ubb.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Rohima, S., Liliana, L., & Putri, A. K. (2020). Poverty Reduction in Regencies/Municipalities in South Sumatra Province. *Society*, 8(2), 581-595.

DOI: [10.33019/society.v8i2.215](https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 27 Juli, 2020;

Diterima: 12 Oktober, 2020;

Dipublikasi: 30 Desember, 2020;

ABSTRAK

Belanja Daerah adalah penganggaran untuk semua kebutuhan dan kegiatan pemerintahan dan dikelola di bawah kewenangan provinsi, kabupaten, dan kota melalui kepala daerahnya masing-masing. Optimalisasi Belanja Daerah yang tepat sasaran berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reduksi kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, dengan menguji pengaruh variabel Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2010-2018. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemetaan Kemiskinan (Poverty Mapping) dengan Tipologi Klassen dan Regresi Linier Berganda. Dengan menggunakan Tipologi Klassen untuk pemetaan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan diperoleh empat klasifikasi wilayah (kuadran) berdasarkan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi: kuadran I (daerah maju dan bertumbuh cepat), kuadran II (daerah maju tetapi tertekan), kuadran III (daerah sedang bertumbuh), dan kuadran IV (daerah relatif tertinggal). Hasil klasifikasi Tipologi Klassen: kuadran I meliputi Kota Palembang, kuadran II meliputi Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Banyuasin. Kuadran III meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Prabumulih, dan Kota Lubuk Linggau. Sedangkan kuadran IV meliputi Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten

Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam. Hasil regresi uji-t menunjukkan bahwa Belanja Bantuan Sosial dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap reduksi kemiskinan, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap reduksi kemiskinan. Hasil regresi uji-F menunjukkan bahwa reduksi kemiskinan dipengaruhi secara simultan oleh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal kurang tepat sasaran. Kebijakan yang diharapkan dapat mereduksi kemiskinan adalah dengan memberikan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal yang tepat sasaran.

Kata Kunci: *Belanja Bantuan Sosial; Belanja Modal; Pemerintah Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Reduksi Kemiskinan*

1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang transfer Dana Perimbangan ke daerah, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perbedaan jenis Dana Perimbangan terletak pada alokasi dananya. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah dan di bawah prioritas nasional. Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Wulandari *et al.*, 2018).

Pendapatan daerah berasal dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), Pendapatan Asli Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sepenuhnya menjadi kewenangan kepala daerah (Delen *et al.*, 2019; Yuliansyah *et al.*, 2020).

Pengelolaan pemerintahan bersifat desentralisasi yang artinya kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola dan membangun daerah (Syari *et al.*, 2017). Pemerintah Daerah mengetahui potensi dan kebutuhan daerah dalam mendukung pembangunan. Proses pembangunan dapat diartikan sebagai serangkaian kombinasi antara kegiatan sosial, ekonomi, dan institusional untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Das *et al.* (2018) menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan terdapat tiga tujuan utama: 1) terpenuhinya kebutuhan pokok, 2) peningkatan kualitas standar hidup, seperti pendapatan, pekerjaan, dan kualitas pendidikan, dan 3) kemampuan ekonomi untuk menentukan pilihan dalam masyarakat.

Menurut Arndt & Tarp (2016), pembangunan merupakan proses perubahan struktur, perilaku, dan institusi sosial untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan dan reduksi kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan. Jika kebutuhan pemerintah tinggi maka kebutuhan belanja pemerintah akan meningkat, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik (Junita *et al.*, 2018).

Optimalisasi Belanja Daerah berdampak baik bagi perekonomian. Belanja Daerah terdiri dari 2 jenis: Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa, dan Belanja Tak Terduga (United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 2015; Korompot & Warongan, 2017; Nasution, 2017; Sijabat, 2017; Wakarmamu & Indrayono, 2019).

Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya alam terutama di sektor pertambangan (minyak dan batubara), perkebunan (teh dan kopi), dan pertanian (karet, kelapa sawit, dan padi). Sumber daya alam tersebut merupakan nilai tambah bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dibandingkan dengan nilai PDRB di Sumatera, PDRB per kapita Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2010-2018, menempati peringkat ke-5 (Katadata.co.id, 2019). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan cenderung tinggi. Namun demikian, nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat membuktikan bahwa kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan telah berkurang secara merata.

Berdasarkan otonomi daerah dan desentralisasi, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 13 kabupaten dan 4 kota yang diwajibkan untuk mengelola anggarannya. Besarnya Belanja Daerah bergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yang apabila Pemerintah Daerah mengelola faktor-faktor tersebut dengan tepat akan meningkatkan Belanja Daerah. Meningkatkan Belanja Daerah akan meningkatkan kepentingan daerah dan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta mereduksi kemiskinan (Rohima, 2018). Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi PDRB, Pendapatan, dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

Tahun	PDRB (dalam miliar rupiah)	Pendapatan Daerah (dalam ribu rupiah)	Belanja Daerah (dalam ribu rupiah)
2013	280,348.46	5,468,139,691.03	5,678,703,610.53
2014	306,421.60	6,252,136,312.52	5,781,570,143.91
2015	331,765.70	5,869,535,074.63	5,169,621,852.82
2016	353,866.90	6,582,780,929.68	4,962,572,330.78
2017	382,885.70	8,195,968,131.80	6,409,382,404.46
2018	419,723.51	9,141,371,395.10	7,941,143,670.10

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2016, 2019)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bergantung pada Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah (Syari *et al.*, 2017; Anita & Aprilianto, 2017). Alokasi belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal dapat mendorong pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengoptimalkan potensi daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera (Susetyo *et al.*, 2018). Jika pertumbuhan ekonomi daerah tinggi, artinya total pendapatan daerah terus bertambah, sehingga dapat mereduksi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan (Akhmad *et al.*, 2018).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang cukup signifikan bagi Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,068 juta jiwa, atau 12,80% dari total penduduk, dan merupakan jumlah penduduk miskin nomor tujuh tertinggi di Indonesia. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki persentase penduduk

miskin tertinggi yaitu 19,12%, sedangkan Kota Pagar Alam memiliki persentase penduduk miskin terendah yaitu 8,77% ([Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2019](#)).

Salah satu upaya reduksi kemiskinan yang dilakukan adalah dengan transfer dana dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di masing-masing daerah. Jumlah transfer dana yang diberikan pemerintah setiap tahun tidak sama, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan di suatu daerah. Transfer dana tersebut merupakan Dana Sosial. Pada tahun 2018, Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki realisasi anggaran bantuan sosial tertinggi, yakni 54,5 miliar rupiah untuk 495.460 keluarga penerima manfaat. Sedangkan Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki realisasi anggaran bantuan sosial terendah yaitu sebesar 1,3 miliar rupiah untuk 11.866 keluarga penerima manfaat ([Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2019](#)).

Kajian tentang reduksi kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan masih terbatas. Studi-studi sebelumnya hanya membahas kemajuan pembangunan terhadap kemiskinan, tanpa mengkaji lebih jauh reduksi kemiskinan di setiap daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji reduksi kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat menyalurkan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal secara tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Pengeluaran Pemerintah

Adolf Wagner menyatakan belanja pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah atas produk nasional di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pemerintahan dalam perekonomian mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Wagner menyebut tren ini sebagai "*law of ever increasing state activity*" (hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah) ([Mangkoesebroto, 2002 sebagaimana dikutip dalam Azwar, 2016](#)). Selanjutnya hukum tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{GpCt}{YpCt} > \frac{GpCt-1}{YpCt-1} > \frac{GpCt-2}{YpCt-2} > \frac{GpCt-n}{YpCt-n} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

GpC = Pengeluaran pemerintah per kapita

YpC = Produk atau pendapatan nasional perkapita

t = waktu

Esensi dari hukum tersebut berarti bahwa kegiatan pemerintah akan menyebabkan kegagalan pasar dan eksternalitas. Kemudian Wagner menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengarah pada hubungan yang kompleks antara industri dan industri dan industri dan masyarakat, yang mengarah pada kegagalan pasar dan eksternalitas negatif yang lebih signifikan.

2.2. Belanja Bantuan Sosial

Beberapa kriteria pengalokasian belanja bansos dalam APBD ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014](#); [Idris et al., 2019](#)) adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Bantuan Sosial tidak didistribusikan terus menerus di setiap tahun anggaran. Belanja Bantuan Sosial didistribusikan secara selektif kepada penerima, dan ada aturan yang jelas terkait penggunaannya.
- 2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan anggaran dalam bentuk uang jika Pemerintah Daerah telah memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang untuk melaksanakan fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Ada anggaran bantuan partai politik untuk Belanja Bantuan Sosial, yang diberikan berdasarkan undang-undang.

Penggunaan Belanja Bantuan Sosial ditekankan pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah masing-masing. Besarnya dana transfer yang disediakan pemerintah setiap tahun tidak sama dan mengikuti kebutuhan masyarakat dan daerah.

2.3. Belanja Modal

Belanja yang bertujuan untuk menambah aset atau kekayaan daerah, kemudian belanja tersebut digunakan secara rutin untuk biaya pemeliharaan, termasuk belanja administrasi umum disebut dengan Belanja Modal (Susetyo *et al.*, 2018). Belanja yang dilakukan oleh pemerintah yang menghasilkan aset tetap tertentu disebut juga dengan Belanja Modal (Triyanto *et al.*, 2017). Pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan setiap Belanja Modal ke dalam laporan realisasi APBD selama satu tahun anggaran.

Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah untuk meningkatkan aset tetap pemerintah seperti gedung, peralatan, dan infrastruktur lainnya yang memiliki peran penting dalam jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Widianto *et al.*, 2015).

2.4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lain-lain pendapatan yang sah. Meskipun Pemerintah Daerah menerima sumber pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang signifikan dalam keuangan daerah untuk menjadi tumpuan utama otonomi daerah dan pembangunan (Nilawati, 2019; Lestari & Utama, 2019).

3. Metodologi Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Tipologi Klassen dan Regresi Linier Berganda. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2019. Data panel sebanyak 405 data yang terdiri dari data primer dan sekunder pada variabel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Modal pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian data deret waktu dimulai dari 2010 hingga 2018.

3.2. Tipologi Klassen

Kemiskinan menjadi ciri perkembangan suatu daerah, baik di provinsi, kabupaten, maupun kotamadya. Klasifikasi tingkat kemiskinan dalam tipologi Klassen sebagai berikut:

Tabel 2. Tipologi Klassen

PE (y) IPM (r)	(y1 > y)	(y1 < y)
(r1 > r)	Kuadran I Daerah maju dan bertumbuh cepat	Kuadran III Daerah sedang bertumbuh
(r1 < r)	Kuadran II Daerah maju tetapi tertekan	Kuadran IV Daerah relatif tertinggal

Sumber: [Sjafrizal \(2012\)](#); [Kuncoro \(2018\)](#)

Keterangan:

r1 = jumlah penduduk miskin kabupaten/kota

r = rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota

y1 = pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota

y = rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota

Analisis klasifikasi tipologi ini bertujuan untuk menentukan kriteria kemiskinan di 15 kabupaten/kota dengan rata-rata kemiskinan kabupaten/kota selama periode penelitian. Apabila indikator kemiskinan suatu daerah lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, maka daerah tersebut memiliki indikator kemiskinan yang tinggi. Sebaliknya jika indikator kemiskinan suatu daerah lebih rendah dari rata-rata kemiskinan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, maka daerah tersebut memiliki indikator kemiskinan yang rendah. Sehingga karakteristik daerah miskin di Provinsi Sumatera Selatan terbagi menjadi empat ([Sjafrizal, 2012](#); [Kuncoro, 2018](#)), sebagai berikut:

- 1) Daerah maju dan bertumbuh cepat atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan kemiskinannya rendah.
- 2) Daerah maju tetapi tertekan atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi namun tingkat kemiskinannya tinggi.
- 3) Daerah sedang bertumbuh atau daerah dengan tingkat kemiskinan rendah tetapi pertumbuhannya ekonominya tinggi.
- 4) Daerah relatif tertinggal atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan tingkat kemiskinan tinggi.

3.3. Model Regresi

Analisis regresi data panel bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2018. Model regresi adalah sebagai berikut:

$$Pov_{it} = \beta_0 + \beta_1 SE_{it} + \beta_2 CE_{it} + \beta_3 LGR_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

Pov_{it} = kemiskinan (persen)

β_0 = konstanta

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$	= koefisien kemiskinan, Belanja Banuan Sosial, Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah
SAE_{it}	= Belanja Bantuan Sosial
CE_{it}	= Belanja Modal
LGR_{it}	= Pendapatan Asli Daerah
ε_{it}	= <i>error</i>
i	= <i>cross section</i>
t	= <i>time series</i>

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Analisis Tipologi Klassen

Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi yang memiliki banyak sumber daya alam dari sektor pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Nilai tambah masing-masing sektor akan menambah angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB per kapita Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 mencapai nilai 50,1 juta rupiah dan menduduki peringkat kelima secara nasional. Perubahan nilai PDRB suatu daerah dibandingkan tahun sebelumnya menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Katadata.co.id, 2019).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2016-2018 menunjukkan nilai yang berfluktuasi. Pada tahun 2018 mencapai nilai 6.04% persen. Angka tersebut lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 yang hanya mencapai 5,17 persen. Pada tahun 2017 dan 2018, capaian pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan lebih besar dibandingkan capaian rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama (Bisnis.com, 2019).

Alokasi anggaran Pemerintah Daerah berupa belanja rutin dan belanja pembangunan untuk pembangunan daerah. Kemudian pengeluaran tersebut dilaporkan dalam APBD. Item yang terdapat dalam APBD terdiri dari belanja rutin untuk mendanai kegiatan pemerintahan. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota memiliki kewenangan untuk menggunakan Belanja Daerah. Syarat optimalisasi Belanja Daerah adalah dapat berdampak pada pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 3. Klasifikasi Tipologi Klassen

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia	Pertumbuhan Ekonomi	Kuadran
Lahat	65.54 <	8958.5 <	IV
Musi Banyuasin	65.75 <	34717.3 >	II
Musi Rawas	63.53 <	9595.1 <	IV
Muara Enim	65.8 <	24438.5 >	II
Ogan Komering Ilir	64.82 <	13524.2 >	II
Ogan Komering Ulu	67.27 >	7246.6 <	III
Banyuasin	64.22 <	14084.1 >	II
Ogan Ilir	64.95 <	5109.4 <	IV
OKU Timur	66.63 <	6999 <	IV
OKU Selatan	63.44 <	3982.4 <	IV
Empat Lawang	63.87 <	2566.6 <	IV
Palembang	75.5 >	66408.8 >	I

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia	Pertumbuhan Ekonomi	Kuadran
Prabumulih	72.17 >	3633.7 <	III
Pagar Alam	65.96 <	1628.5 <	IV
Lubuk Linggau	72.05 >	2907.3 <	III
Rata-Rata	66.76	12538.9	

Sumber: data diolah (2019)

Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota memiliki kewenangan untuk menggunakan belanja daerah. Syarat optimalisasi Belanja Daerah adalah dapat berdampak pada pembangunan ekonomi daerah. Hasil klasifikasi tipologi Provinsi Sumatera Selatan diperoleh empat pengelompokan daerah (kuadran) berdasarkan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:

- 1) Kuadran I (daerah maju dan bertumbuh cepat). Daerah yang termasuk dalam kuadran satu adalah Kota Palembang karena merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian.
- 2) Kuadran II (daerah maju tetapi tertekan dengan kemiskinan tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi). Daerah yang termasuk dalam kuadran dua adalah Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu daerah penyumbang hasil tambang minyak bumi di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Kabupaten Muara Enim, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin merupakan daerah penghasil kelapa sawit dan karet. Pabrik pengolahan sawit dan karet bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- 3) Kuadran III (daerah sedang bertumbuh dengan tingkat kemiskinan rendah). Daerah yang termasuk dalam kuadran tiga adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Prabumulih, dan Kota Lubuk Linggau. Kota Prabumulih dan Kota Lubuk Linggau merupakan daerah pemekaran yang memiliki banyak sumber daya alam. Sumber daya alam utama di Kota Prabumulih adalah minyak, kelapa sawit, dan karet. Sedangkan Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki banyak sumber daya alam berupa karet, kelapa sawit, dan hasil pertanian.
- 4) Kuadran IV (daerah relative tertinggal dengan angka kemiskinan tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah). Daerah yang termasuk dalam kuadran empat adalah Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam. Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam memiliki banyak sumberdaya alam berupa hasil perkebunan (teh dan kopi) namun memerlukan program produk hilir dan akses jalan yang memadai. Begitu pula dengan Kabupaten Empat Lawang yang membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk melakukan mobilitas perekonomian, sehingga menghambat aktivitas perekonomian di daerah tersebut. Kabupaten Ogan Ilir kurang mengalami kemajuan karena masyarakat belum mendapatkan program-program pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan daerah pemekaran baru dan masih terus meningkatkan pembangunan. Kurangnya pembangunan di daerah kuadran empat karena pola pikir masyarakat yang skeptis terhadap masyarakat migran dan program pembangunan pemerintah.

4.2. Statistik Analisis

Pemilihan model estimasi data panel terbaik yang digunakan dalam analisis mengacu pada uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow menentukan apakah analisis akan menggunakan *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Sebaliknya, uji Hausman menentukan apakah analisis akan menggunakan *Fixed Effect* atau *Random Effect*.

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	41.683725	(14,132)	0.0000
Cross-section Chi-square	253.542077	14	0.0000

Sumber: data diolah (2019)

Nilai probabilitas 0,00 yang berarti lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Kemudian H_0 ditolak yang menunjukkan bahwa model estimasi data panel yang digunakan adalah model *Fixed Effect* yang lebih baik dari model *Common Effect*.

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.782868	3	0.0323

Sumber: data diolah (2019)

Nilai probabilitas 0,0323 berarti kurang dari 0,05. Dengan demikian secara statistik H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model estimasi data panel yang digunakan adalah model *Fixed Effect* yang lebih baik dari model *Random Effect*.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji Chow dan uji Hausman, kedua nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05, sehingga penelitian ini menggunakan model *Fixed Effect*.

Tabel 6. Model Regresi Fixed Effect

Dependent Variable: Pov?					
Method: Pooled Least Squares					
Date: 09/10/19 Time: 07:49					
Sample: 2008 2017					
Included observations: 10					
Cross-sections included: 15					
Total pool (balanced) observations: 150					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	15.75050	4.490734	3.507332	0.0006	
LNSAE?	0.309322	0.080020	3.865581	0.0002	
LNCE?	0.559765	0.343475	1.629714	0.1055	
LNLOCALLY_GENERATE					
D REVENUE?	-1.017792	0.200355	-5.079951	0.0000	
Fixed Effects (Cross)					
_LAHAT--C	4.906372				
_MUBA--C	5.104178				
_MURA--C	3.994148				
_ME--C	0.799268				
_OKI--C	1.707452				
_OKU--C	-1.433867				
_BA--C	-1.913108				
_OI--C	-0.327272				
_OKUT--C	-4.427601				
_OKUS--C	-3.203717				
_EL--C	-0.921154				
_PAL--C	1.296510				
_PBM--C	-1.569226				
_PGA--C	-4.751256				
_LLG--C	0.739272				
Effects Specification					
Cross-section fixed (dummy variables)					
R-squared	0.859763	Mean dependent var	14.12247		
Adjusted R-squared	0.841703	S.D. dependent var	3.222711		
S.E. of regression	1.282207	Akaike info criterion	3.447210		
Sum squared resid	217.0154	Schwarz criterion	3.808486		
Log likelihood	-240.5408	Hannan-Quinn criter.	3.593985		
F-statistic	47.60389	Durbin-Watson stat	0.897886		
Prob(F-statistic)	0.000000				

Source: data diolah (2019)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada **Tabel 6**, model persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pov} &= 15.75050 + 0.309322 + 0.559765 - 1.017792 \dots\dots\dots (2.1) \\ \text{Std. Error} &= (4.490743) \quad (0.080020) \quad (0.343475) \quad (0.200355) \\ \text{t-Statistic} &= (3.507332) \quad (3.865581) \quad (1.629714) \quad (-5.079951) \\ \text{F-Statistic} &= 47.60389 \\ \text{R-Square} &= 0.859763 \end{aligned}$$

Hasil regresi antara variabel Belanja Bantuan Sosial dan kemiskinan kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan nilai t sebesar $3,8655 > 1,65622$, H_0 ditolak. Artinya, ketika Belanja Bantuan Sosial naik sebesar 0,3 persen dapat mereduksi kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,3 persen.

Sedangkan Belanja Modal menunjukkan nilai t-Statistic $1.629714 < 1.65622$, maka H_1 ditolak. Artinya, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap reduksi kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t-Statistic dan t-tabel $5,0799 > 1,6730$, H_1 diterima, dan H_0 ditolak. Artinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap reduksi kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 1 persen, kemiskinan berkurang 1 persen.

Jika diuji secara simultan antara variabel Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap reduksi kemiskinan, diperoleh hasil F-Statistic dan F-table $22.9430 > 2.67$. Berdasarkan uji hipotesis, penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_1 yang artinya Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap reduksi kemiskinan.

Nilai pengaruh variabel independen ini didasarkan pada nilai koefisien determinan (R-Square) sebesar 0.859763. Artinya, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap 85,9763% reduksi kemiskinan, sedangkan 14,0237% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

4.3. Analisis Reduksi Kemiskinan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Selain itu terkait dengan pendapatan yang rendah, standar hidup yang rendah, perumahan yang tidak layak untuk ditinggali, kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah, yang pada akhirnya membuat sumber daya manusia tidak berkualitas, sehingga meningkatkan pengangguran (Felix, 2011; Ismail & Hakim, 2014).

Peningkatan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 persen akan mereduksi kemiskinan sebesar 1 persen di 15 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil ini sejalan dengan teori pengeluaran pemerintah berdampak pada kemiskinan, yang menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah maka akan mereduksi kemiskinan (Todaro & Smith, 2015).

Anwar (2017) dan Sasti & Latrini (2019) menyatakan bahwa alat yang digunakan untuk mereduksi kemiskinan secara langsung dan tidak langsung dapat menggunakan belanja pemerintah berupa Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan pembangunan ekonomi lainnya. Omodero (2019) berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia dapat mengurangi tingkat kemiskinan menggunakan analisis data panel, model CGE, dan analisis *cross-section*.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan potensi sumber daya daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan inti dari pelaksanaan otonomi daerah. Meskipun terkadang masih terdapat ketergantungan yang sangat tinggi pada Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal, termasuk temuan yang diperoleh melalui penelitian ini.

Realisasi anggaran Belanja Bantuan Sosial di 15 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan wawancara di lapangan masih belum mampu mengurangi kemiskinan. Ini menunjukkan ketidakmampuan 15 Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf hidup. Selain itu, program reduksi kemiskinan yang tidak tepat sasaran seperti Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam indikator kemiskinan telah meningkatkan angka kemiskinan dan memperlebar jurang kemiskinan.

Implikasi yang sama juga berlaku untuk Belanja Modal. Hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh secara parsial dalam reduksi kemiskinan. Menurut [Widianto *et al.* \(2015\)](#), pengaruh langsung Belanja Modal adalah manfaat belanja pada program kerja dan kesejahteraan. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya adalah manfaat ketika pemerintah berinvestasi di bidang infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang lebih tinggi memungkinkan masyarakat miskin meningkatkan pendapatan. Hubungan antara Belanja Modal dan kemiskinan merupakan stimulus dari pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan upah.

Peningkatan Belanja Modal akan meningkatkan aktivitas ekonomi, meningkatkan permintaan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan menciptakan permintaan agregat yang tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Triyanto *et al.* \(2017\)](#), [Badrudin & Kuncorojati \(2017\)](#), [Suratno & Ardita \(2018\)](#), dan [Sasti & Latrini \(2019\)](#), menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain itu, secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemiskinan memiliki hubungan negatif jika dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mengurangi kemiskinan. Pada posisi hasil ini, hasil penelitian masih relevan dengan teori dan penelitian sebelumnya.

Menurut [Mun'im \(2012\)](#), [Adiguno *et al.* \(2014\)](#), dan [Ludi & Bird \(2007\)](#), masalah utama kemiskinan adalah aksesibilitas, yaitu kemampuan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya, yaitu hak-haknya sebagai manusia dan warga negara. Akses yang tidak bisa didapatkan oleh masyarakat miskin meliputi:

- 1) makanan yang layak
- 2) pakaian yang layak
- 3) rumah layak huni
- 4) pelayanan kesehatan yang memadai
- 5) layanan pendidikan
- 6) waktu luang dan hiburan
- 7) kualitas hidup yang layak

Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah berkewajiban meningkatkan Belanja Modal dalam pembangunan manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya, termasuk kegiatan sektor ekonomi. Peningkatan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal berdampak pada peningkatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mereduksi kemiskinan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tipologi Klassen, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam merupakan daerah relatif tertinggal dengan tingkat kemiskinan tinggi dan pertumbuhan perekonomian rendah.

Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil regresi uji-t, Belanja Bantuan Sosial berpengaruh positif terhadap kemiskinan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Belanja Modal tidak mempengaruhi kemiskinan. Hasil regresi uji-F menunjukkan bahwa reduksi kemiskinan dipengaruhi secara simultan oleh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah.

6. Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini merupakan penelitian hibah kompetitif yang didanai oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya melalui Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Nomor 3263/UN9.FE/TU.SK/2019. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sebagai penyandang dana penelitian ini dan Universitas Bangka Belitung sebagai mitra penelitian serta semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Adiguno, R., Sihombing, L., & Hutajulu, A. T. (2014). Analisis Akses Pangan di Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics*, 3(6). Retrieved from <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ceress/article/view/8217>
- Akhmad, Alias, & Amir. (2018). The Effect of Economic Growth and Income Inequality on Poverty in Indonesia. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 9(4), 20–26. Retrieved from <http://www.iosrjournals.org/iosr-jef/papers/Vol9-Issue4/Version-2/D0904022026.pdf>
- Anita, N., & Aprilianto, R. A. (2017). Analysis of Effect of Local Own Source Revenue and Government Spending on Economic Development in the Tegal Regency. *Governance Theory and Practices in Asia Pasific (International Conference on Public Organization VII 2017)*, 1080–1095. Sumedang, Indonesia. Retrieved from <http://apspa.org/wp-content/uploads/2018/02/Proceeding-ICONPO-VII-2017.pdf>
- Anwar, A. (2017). Peran Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Jawa. *Jurnal Economia*, 13(1), 79–94. <https://doi.org/10.21831/economia.v13i1.13323>
- Arndt, C., & Tarp, F. (2016). *Measuring Poverty and Wellbeing in Developing Countries*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198744801.001.0001>
- Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(2), 149–167. Retrieved from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/186>

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2016, July). *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2016* (Nomor Publikasi 16560.1601). Retrieved from <https://sumsel.bps.go.id/publication/2016/07/15/9a08ff7c004f9d0aed0f9243/provinsi-sumatera-selatan-dalam-angka-2016.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2019, August). *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2018* (Nomor Publikasi 16560.1901). Retrieved from <https://sumsel.bps.go.id/publication/2019/08/16/2538e50f10441c67e0860a73/provinsi-sumatera-selatan-dalam-angka-2019.html>
- Badrudin, R., & Kuncorojati, I. (2017). The effect of district own-source revenue and balance funds on public welfare by capital expenditure and economic growth as an intervening variable in Special District of Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 19(1), 54–59. <https://doi.org/10.9744/jmk.19.1.54-59>
- Bisnis.com. (2019, February 6). Pertumbuhan Ekonomi Sumsel 2018 6,04% Masih di Atas Nasional. Retrieved from <https://sumatra.bisnis.com/read/20190206/534/885932/pertumbuhan-ekonomi-sumsel-2018-604-masih-di-atas-nasional>
- Darmawan, M. J., & Tukiman, T. (2020). Analisis Dimensi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 41-53. Retrieved from <http://www.ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2045>
- Das, S., Mourmouras, A., & Rangazas, P. (2018). *Economic Growth and Development: A Dynamic Dual Economy Approach* (2nd ed. 2018 ed.). Cham, Switzerland: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-89755-4>
- Delen, D., Pudjiharjo, P., & Susilo, S. (2019). Has Fiscal Decentralization Succeeded in Increasing Quality Economic Growth in East Java? *Jurnal Bina Praja*, 11(1), 15–29. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.15-29>
- Felix, O. (2011). Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*, 4(1), 1-6. Retrieved from <https://academicjournals.org/journal/JAT/article-abstract/2F1A0E41096>
- Idris, I., Fajrillah, N., Yasin, H., Harahap, A. K., Rahmat, J. S., Susanti, M., & Dania, I. A. (2019). Analysis of Performance Realization of Government Regional Income and Expenditure Budget in Medan City. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 27(2), 101-105. Retrieved from [https://www.idosi.org/mejsr/mejsr27\(2\)19/3.pdf](https://www.idosi.org/mejsr/mejsr27(2)19/3.pdf)
- Ismail, A., & Hakim, A. (2014). Peran Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 16(9), 2168–2186. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol16.iss9.art8>
- Junita, A., Abubakar, E., & Abdullah, S. (2018). The Effect of Budget Variances on the Local Government Budget Changes with Legislature Size as Moderator. *Academic Journal of Economic Studies*, 4(1), 162–173.
- Katadata.co.id. (2019, July 29). Inilah Provinsi dengan PDRB per Kapita Tertinggi di Sumatera. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/29/inilah-provinsi-dengan-pdrb-per-kapita-tertinggi-di-sumatera>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014, October 15). Budget in Brief APBN 2015. Retrieved from <http://www.anggaran-old.kemenkeu.go.id/dja/acontent/bibfin.pdf>

- Korompot, R., & Warongan, J. (2017). Analysis of Financial Performance in the Government of North Sulawesi. *Jurnal Accountability*, 6(2), 9–19. <https://doi.org/10.32400/ja.17755.6.2.2017.9-19>
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- Lestari, S., & Utama, M. S. (2019). The Effect of Local Government Own Revenue and Revenue Sharing Funds on Economic Performance and Community Welfare Through Capital Expenditure of Regency/City in Bali Province, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 91(7), 67–87. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-07.08>
- Ludi, E., & Bird, K. (2007). *Understanding Poverty* (Brief No 1). Swiss Agency for Development and Cooperation. Retrieved from <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/5678.pdf>
- Mun'im, A. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Ketersediaan, Akses, dan Penyerapan Pangan Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Surplus Pangan: Pendekatan Partial Least Square Path Modeling. *Jurnal Agro Ekonomi*, 30(1), 41–58. <https://doi.org/10.21082/jae.v30n1.2012.41-58>
- Nasution, A. (2017). The government decentralization program in Indonesia. In N. Yoshino & P. J. Morgan (Eds.), *Central and Local Government Relations in Asia: Achieving Fiscal Sustainability* (ADB Series on Asian Economic Integration and Cooperation ed., pp. 276–305). Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781786436870.00017>
- Nilawati, E. (2019). Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 9(1), 41–60. <https://doi.org/10.30588/jmp.v9i1.469>
- Omodero, C. O. (2019). Government Sectoral Expenditure and Poverty Alleviation in Nigeria. *Research in World Economy*, 10(1), 80–90. <https://doi.org/10.5430/rwe.v10n1p80>
- Rohima, S. (2018). Development Inequality of District/City in South Sumatra (2008-2015). *AFEBI Economic and Finance Review*, 3(01), 42–55. <https://doi.org/10.47312/aefer.v3i01.146>
- Sasti, I. A. T. P., & Latrini, M. Y. (2019). Pengaruh Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1632–1659. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p29>
- Sijabat, R. (2017). Do Productive Government Expenditures Affect Economic Growth? Evidence from Provincial Governments across Indonesia. *Journal of Government and Politics*, 8(1), 1–47. <https://doi.org/10.18196/jgp.8149>
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta, Indonesia: PT Rajagrafindo Persada.
- Suratno, & Ardita. (2018). Effect of Government Investment and Capital Participation on Local Own-Source Revenue: The Case of Indonesia. *European Research Studies Journal*, 21(4), 368–377. <https://doi.org/10.35808/ersj/1127>
- Susetyo, D., Zunaidah, Z., Rohima, S., Valeriani, D., & Bashir, A. (2018). Impact of Capital Expenditure and Public Utility Customers to Economic Development of District-City in Sumatra-Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(1), 126–135. Retrieved from <https://econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/5768>
- Syari, D. D., Syamsurijal, S., & Robiani, B. (2017). The Effect of Fiscal Decentralization to Gross Domestic Regional Product of District/City in South Sumatra Province. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 1(2), 181–202. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v1i2.181-202>

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Hallbergmoos, Germany: Pearson.
- Triyanto, D., Wahyudi, S. T., & Ananda, C. F. (2017). The Effect of Capital Expenditure on Local Revenue: Study In East Java Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 137-144. <https://doi.org/10.24843/jekt.2017.v10.i02.p04>
- United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT). (2015). *The Challenge of Local Government Financing in Developing Countries*. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1732The%20Challenge%20of%20Local%20Government%20Financing%20in%20Developing%20Countries%20_3.pdf
- Wakarmamu, T., & Indrayono, Y. (2019). Spending and development in Papua province of Indonesia. *Management Science Letters*, 9(12), 2131-2142. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.6.021>
- Widianto, A., Sari, Y. P., & Hetika. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal , Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JURNAL EKBIS (Ekonomi dan Bisnis)*, 3(1), 1-12.
- Wulandari, E., Wahyudi, M., & Rani, U. (2018). Effect of Original Local Government Revenues, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Share Funds, Other Legal Revenues, Budget Surplus/Deficit to Human Development Index Through Capital Expenditures: Case Study of Regencies/Municipalities in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(2), 125-137. Retrieved from http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_7-s2_h17-129_125-137.pdf
- Yuliansyah, R., Susanti, E. I., & Yanti, A. (2020). The Effect of Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of District Governments in West Java Province in 2013-2017. *Proceedings of the Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2019)*, 152-156. Jakarta, Indonesia: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200309.034>

Tentang Penulis

1. **Siti Rohima**, memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Ekonomi dari Universitas Brawijaya, Indonesia, pada tahun 2013. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia.
E-Mail: sitirohima@unsri.ac.id
2. **Liliana**, memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2009. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia.
E-Mail: liliana@unsri.ac.id
3. **Aning Kesuma Putri**, memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi dari Universitas Sriwijaya, Indonesia, pada tahun 2010. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, Indonesia.
E-Mail: aning@ubb.ac.id